



the spice islands 



**RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	1
Kata Pengantar	2
Bab I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.2 Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	56
LAMPIRAN	57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku setelah melewati proses penyusunan Ranwal, dan Rancangan, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ambon, Februari 2023
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku,



Affandy Hasanusi, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800103 199912 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenrintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017 – 2019.
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2024 serta bertujuan untuk :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku serta indikator kinerja Dinas Pariwisata da Provinsi Maluku yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dinas, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Dinas, uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan dan evaluasi rumusan program.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dan Capaian Renstra OPD

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2022 mendapat anggaran murni sebesar **Rp. 28.243.708.322** dan mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.33.403.078.549**, penggunaan anggaran ini untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Presentase Capaian Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terwujudnya Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Laporan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	61 orang	61 orang	54 orang	54 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD						1 laporan	1 laporan	100%
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	90 stel	90 stel	130 paket	130 paket	100%	190 paket	190 paket	100%
3	26	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	23 orang	23 orang	100%
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%	-	-	-
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 komponen	4 komponen	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	23 peralatan	23 peralatan	4 paket	4 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
3	26	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 jenis peralatan	33 jenis peralatan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	10 kali	10 kali	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 kali	21 kali	26 laporan	26 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 unit	3 unit	-	-	100%	1 unit	1 unit	100%
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	88 buah	88 buah	-	-	100%	1 paket	1 paket	100%
3	26	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 sarana pasarana	5 sarana pasarana	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kelancaran Administrasi dan operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	42 orang non ASN	42 orang non ASN	12 laporan	12 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	8 kendaraan	8 kendaraan	6 unit	6 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 kendaraan	18 kendaraan	20 unit	20 unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 peralatan dan mesin	35 peralatan dan mesin	56 unit	56 unit	100%	45 Unit	45 Unit	100%
3	26	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 sarana	1 sarana	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan; Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa); PDRB Bidang Pariwisata	122,005,000,000	1,305,540,000,000	1,318,714,200,000	1,908,466,888,772	100%	1.318.714.200.000	1,908,466,888,772	100%
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata unggulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah lokasi Daya Tarik Unggulan provinsi sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 DTW	3 DTW	7 lokasi	7 lokasi	100%	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi						1 dokumen	1 dokumen	100%
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							100%	100%	100%
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Stagis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Stagis Pariwisata Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Kunjungan pada Destinasi Wisata yang dikelola Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata provinsi yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	11 lokasi	11 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100%	5 Lokasi	5 Lokasi	100%
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	3 DTW	3 DTW	11 unit	11 unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Peningkatan Usaha Pariwisata yang Terdaftar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah unit usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	120 usaha yang dibina, 1 lokasi penerapan sadar wisata	120 usaha yang dibina, 1 lokasi penerapan sadar wisata	60 unit usaha	60 unit usaha	100%	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100%
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan; PDRB Bidang Pariwisata	Mancanegara 20.000 org, Nusantara 125.000 org	Mancanegara 1.450 org, Nusantara 316.899 org	Mancanegara 1.500 org, Nusantara 320.000 org	Mancanegara 7.422 org, Nusantara 380.167 org		Mancanegara 1.500 org, Nusantara 320.000 org	Mancanegara 7.422 org, Nusantara 380.167 org	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara; Presentase jumlah wisatawan nusantara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	2 TIC	2 TIC	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	1 Dokumen	100%

3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 event	2 event	7 Laporan	7 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- TV Swasta, - Music Travelling, - Video Promosi, - Foto Booth, - Influencer	- TV Swasta, - Music Travelling, - Video Promosi, - Foto Booth, - Influencer	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa); PDRB Bidang Pariwisata	1.99%	3,12%	3,15%	1.49%		3,15%	1.49%	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase jumlah kegiatan ekonomi kreatif untuk pembinaan dan pengembangan pasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	45 Unit	45 Unit	100%	3 unit	3 unit	100%
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 lokasi	8 lokasi	-	-	-	-	-	-
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan usaha Kreatif terutama bagi Usaha Pemula	4 lokasi	4 lokasi	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang diberikan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PDRB Bidang Pariwisata*	1.99%	3.12%	3,15%	1,49%		3,15%	1,49%	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Suber Daya Manusia Pariwisata yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	60 orang, 4 putra putri Pariwisata	60 orang, 4 putra putri Pariwisata	75 Orang	75 Orang	100%	120 Orang	120 Orang	100%
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Festival, 4 Lembaga, 3 Kerjasama	1 Festival, 4 Lembaga, 3 Kerjasama	370 orang	370 Orang	100%	40 orang	40 Orang	100%
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	-	-	50 orang	50 Orang	100%	30 orang	30 Orang	100%
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	45 orang, 1 kegiatan EHP	45 orang, 1 kegiatan EHP	99 orang	99 orang	100%	-	-	-
3	26	05	1.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang berkualitas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-	90 Orang	90 Orang	100%	35 Orang	35 Orang	100%

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2019 -2024 mengacu pada hasil laporan kinerja Dinas Pariwisata Tahun dan Laporan Kerja Pertanggungjawaban Tahun 2022. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022, adalah seperti terdapat pada lampiran 1.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 memuat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Maluku di pasar Nasional dan Internasional;
2. Meningkatkan Pendapatan Sektor Pariwisata.

Sasaran Strategis ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan daya saing sektor pariwisata baik melalui peningkatan promosi Pariwisata yang ada di Maluku maupun peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien agar mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata ke Maluku. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Maluku. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas). Di samping itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sangat diperlukan dalam mempersiapkan SDM unggul yang dapat mengelola dan menata setiap potensi Pariwisata yang ada di Maluku untuk dapat dikembangkan demi meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu capaian sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara;

3. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara;
4. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara;
5. Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa);
6. PDRB Bidang Pariwisata.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada lampiran 2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022(Thn n - 2)	Tahun 2023 (Thn n - 1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n + 1)	Tahun 2021 (Thn n - 3)	Tahun 2022 (Thn n - 2)	Tahun 2023 (Thn n - 1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n +1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan			159,863	167,856	430,089	453,191	318,349	387,589	408,055	430,089	453,191	
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara			22,050	23,153	10,656	12,787	1,450	7,422	8,880	10,656	12,787	
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara			137,813	144,703	419,433	440,404	316,899	380,167	399,175	419,433	440,404	
4	Lama Kunjungan Wisatawan :												
	- Wisatawan Nusantara			7	8	-	-	4	1.74	-	-	-	
	- Wisatawan Mancanegara			5	6	-	-	5	3.11	-	-	-	
5	Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa /Juta Rupiah)			261,189	274,248	-	-	1,305,540	1,908,466	-	-	-	
6	PDRB Bidang Pariwisata			2.06	2.13	-	-	3,15	1.49	-	-	-	
7	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Maluku					1.51	1.52			1.5	1.51	1.52	

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku No 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku,

Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah bidang Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Perumusan program di bidang pariwisata sesuai Rencana Strategis Daerah/ RPJMD ;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
4. Pembinaan teknis di bidang pariwisata;
5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Industri Wisata
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Analisa dan Strategi Pemasaran
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan SDM Kepariwisataan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Riset, Edukasi, Permodalan, Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemasaran, Fasilitas HAKI dan Hubungan Antar Lembaga
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan :
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa :

- 1. Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Pariwisata daerah provinsi Maluku, telah dilakukan secara rutin rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kegiatan serta arah kebijakan pembangunan pariwisata antara Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, juga dengan Dinas Pariwisata 11 Kab/Kota se-Provinsi Maluku.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku adalah perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca yang ekstrim, lambatnya laju pertumbuhan

ekonomi domestic, masih kurangnya pengembangan pada potensi daya Tarik wisata di berbagai daerah, masih rendahnya kualitas SDM kepariwisataan, masih kurangnya kesadaran masyarakat local dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media social, influencer, kerjasama social, dll) dalam mempromosikan potensi wisata.

3. Peluang dan ancaman dalam meningkatkan pelayanan OPD .

- PELUANG/OPPORTUNITY :

- Penerapan protokol CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yang diaplikasikan melalui sertifikasi akan menambah *trust* wisatawan, sehingga wisatawan dapat berwisata lebih aman dan nyaman.
- Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan mitra pariwisata di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota
- Masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
- Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan mampu menarik perhatian wisatawan
- Adanya promosi pariwisata melalui berbagai media online / platform digital
- Adanya peningkatan frekuensi penyelenggaraan event di Maluku

- ANCAMAN :

- Sektor pariwisata mempunyai peran penting pada pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk pemasukan devisa negara. Selama Covid-19, masih banyak aktivitas ekonomi yang terhambat. Pelonggaran pembatasan perjalanan internasional di masa depan akan mengakibatkan meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal tersebut akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya pariwisata Maluku apabila tidak dilakukan pemulihan pariwisata yang komprehensif.
- Pembangunan Pariwisata yang belum merata

- Tidak ada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat
- Objek dan daya tarik wisata menjadi tidak menarik dan kurang diminati oleh wisatawan
- Potensi wisata tidak dikenal secara global ke seluruh dunia
- Menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Maluku

4. Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan yang kini semakin diandalkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, berkaitan dengan hal tersebut, isu strategi yang diangkat oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- Pariwisata adalah sektor paling terdampak pandemi;
- Tingkat kunjungan wisata masih rendah
- Banyak potensi daya tarik wisata di berbagai daerah belum tersentuh pengembangan;
- Kurangnya dukungan permodalan, peralatan serta pemasaran terhadap ekonomi kreatif;
- Rendahnya kualitas SDM kepariwisataan;
- Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder pariwisata;
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, influencer, dll) dalam mempromosikan potensi wisata.

II.4. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku, yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, tidak ada program dan kegiatan yang berubah, namun ada beberapa sub kegiatan baru pada tahun 2023. Terdapat juga penyesuaian kondisi dan situasi

yang berkembang adanya perubahan target kinerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam lampiran 3.

Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah		Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,171,925,241	Program Penunjang Urusan Pemerintah		Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,171,925,241	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	100%	617,623,673	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	100%	617,623,673	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	332,247,420	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	332,247,420	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,587,024	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,587,024	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	14,055,120	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	14,055,120	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota	251,734,109	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota	251,734,109	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase terwujudnya Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Laporan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	6,846,818,518	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase terwujudnya Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Laporan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	6,846,818,518	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 orang	6,744,638,518	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 orang	6,744,638,518	

	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	95,280,000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	95,280,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3,450,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3,450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,450,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,450,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	100%	128,902,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	100%	128,902,500	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	190 paket	68,947,500	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	190 paket	68,947,500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	59,955,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	59,955,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	100%	767,355,489	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	100%	767,355,489	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	214,964,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	214,964,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	4 paket	75,748,789	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	4 paket	75,748,789	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	20,801,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	20,801,700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	22,452,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	22,452,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	383,389,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	383,389,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Operasional Perkantoran	100%	602,970,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Operasional Perkantoran	100%	602,970,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	449,526,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	449,526,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	1 paket	103,444,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	1 paket	103,444,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	50,000,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Kelancaran Administrasi dan operasional Perkantoran	100%	2,022,726,661	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Kelancaran Administrasi dan operasional Perkantoran	100%	2,022,726,661	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	160,710,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	160,710,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1,860,516,661	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1,860,516,661	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100%	1,185,528,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100%	1,185,528,400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	48,945,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	48,945,400	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	364,653,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	364,653,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45 unit	41,690,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45 unit	41,690,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	2 unit	30,240,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	2 unit	30,240,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	700,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	700,000,000	
II	Program Pemasaran PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara	122,005,000,000	6,984,996,864	Program Pemasaran PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara	122,005,000,000	6,984,996,864	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara; Presentase jumlah wisatawan nusantara	100%	6,984,996,864	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara; Presentase jumlah wisatawan nusantara	100%	6,984,996,864	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	5 dokumen	2,084,000,996	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	5 dokumen	2,084,000,996	
	Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	3,959,841,800	Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 laporan	3,959,841,800	

	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	60,825,068	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	60,825,068	
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	880,329,000	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	880,329,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa)	122,005,000,000	6,324,165,106	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa)	122,005,000,000	6,324,165,106	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Presentase Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata unggulan	100%	1,197,690,358	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Presentase Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata unggulan	100%	1,197,690,358	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		Jumlah lokasi Daya Tarik Unggulan provinsi sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 lokasi	1,093,101,758	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		Jumlah lokasi Daya Tarik Unggulan provinsi sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 lokasi	1,093,101,758	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		Jumlah dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 dokumen	104,588,600	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		Jumlah dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 dokumen	104,588,600	
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Presentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata yg dilaksanakan	100%	68,738,275	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Presentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata yg dilaksanakan	100%	68,738,275	
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Tersedianya dokumen penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 dokumen	68,738,275	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Tersedianya dokumen penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 dokumen	68,738,275	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Presentase Peningkatan Kunjungan pada Destinasi Wisata yang dikelola Provinsi	100%	4,752,186,820	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Presentase Peningkatan Kunjungan pada Destinasi Wisata yang dikelola Provinsi	100%	4,752,186,820	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata provinsi yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 lokasi	1,957,156,820	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata provinsi yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 lokasi	1,957,156,820	

	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	3 unit	2,795,030,000	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	3 unit	2,795,030,000	
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Peningkatan Usaha Pariwisata yang Terdaftar	100%	305,549,653	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Peningkatan Usaha Pariwisata yang Terdaftar	100%	305,549,653	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	1 laporan	129,314,000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	1 laporan	129,314,000	
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah unit usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	60 unit usaha	176,235,653	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah unit usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	60 unit usaha	176,235,653	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PDRB Bidang Pariwisata*	3,15%	1,632,460,312	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PDRB Bidang Pariwisata*	3,15%	1,632,460,312	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapisitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkualitas	100%	1,600,390,312	Pelaksanaan Peningkatan Kapisitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkualitas	100%	1,600,390,312	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	1,293,948,000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	1,293,948,000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 orang	220,934,312	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 orang	220,934,312	

	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	30 orang	75,708,000	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	30 orang	75,708,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	9,800,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	9,800,000	
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang berkualitas	100%	32,070,000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang berkualitas	100%	32,070,000	
	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif	35 orang	32,070,000	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif	35 orang	32,070,000	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		PDRB Bidang Pariwisata*	3,15 %	1,628,830,240	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		PDRB Bidang Pariwisata*	3,15 %	1,628,830,240	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Presentase jumlah kegiatan ekonomi kreatif untuk pembinaan dan pengembangan pasar	100%	974,720,100	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Presentase jumlah kegiatan ekonomi kreatif untuk pembinaan dan pengembangan pasar	100%	974,720,100	
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3 unit	681,810,100	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3 unit	681,810,100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan usaha Kreatif terutama bagi Usaha Pemula	1 laporan	292,910,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan usaha Kreatif terutama bagi Usaha Pemula	1 laporan	292,910,000	
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	100%	654,110,140	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	100%	654,110,140	

	Pemberian Insentif		Jumlah Insentif yang diberikan	1 laporan	569,399,990	Pemberian Insentif		Jumlah Insentif yang diberikan	1 laporan	569,399,990	
	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	27,171,150	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	27,171,150	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 dokumen	57,539,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 dokumen	57,539,000	
	TOTAL PAGU INDIKATIF 2023				28,742,377,763	TOTAL PAGU INDIKATIF 2023				28,742,377,763	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku memfasilitasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	KKT dan Wakasihu	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	Pokok-Pokok Pikiran DPRD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku (RPJMD) Tahun 2019 – 2024, Visi dan Misi Pembangunan Daerah Maluku **“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”**.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Maluku adalah

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Berdasarkan misi ke-5 (Lima) terkait maka Tujuan Pembangunan Pariwisata Maluku Tahun 2019-2024 adalah: **“Mewujudkan Pariwisata Maluku Berdaya Saing Berbasis Bahari, Sejarah Dan Kearifan Budaya Yang Mendorong Pembangunan Gugus Kepulauan Serta Kesejahteraan Rakyat Yang Berkelanjutan”**. Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Maluku adalah sebagai meliputi:

1. Meningkatkan daya saing pariwisata Maluku di pasar Nasional dan Internasional.
2. Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata.

III.2. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pengembangan Pariwisata provinsi Maluku, antara lain,
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - 2) Pencapaian target kinerja pemerintah daerah bidang pariwisata
 - 3) Pendayagunaan potensi pariwisata daerah baik potensi alam, SDM maupun industri
 - 4) Pengentasan Kemiskinan
- b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023
 - a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku di Tahun 2023 melalui beberapa kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif. Sub Kegiatan : Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, berupa Sertifikasi Makanan Halal di Kota Ambon; Lomba Membangun Negeri di Kota Ambon; Corner Kreatif; Dukungan Ekonomi Kreatif untuk event; Pendukungan event.
 - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula, berupa Bantuan Ekraf di 6 lokasi (Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tengah, Pulau Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur)
 - Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan : Pemberian Insentif, berupa Bantuan Ekraf sebanyak 13 paket, Bantuan Ekonomi Kreatif di Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru, kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual.

- Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual, berupa fasilitasi Sertifikasi HAKI di Kota Ambon (28 orang).

➤ Pencapaian IKU Perangkat Daerah

Capaian IKU Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2022 dari 6 indikator dapat dijelaskan bahwa

- Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, melewati target yang ditetapkan yaitu mencapai 7.422 orang atau sebesar 494,80% dari target 1.500 orang.
- Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara, melewati target yang ditetapkan dari 320.000 orang tercapai 380.167 orang atau sebesar 118,80%
- Indikator Lama Kunjungan Wisatawan Nusantara, tidak melewati target yang ditetapkan selama 4 hari menjadi 1,74 hari atau hanya tercapai 43,50%.
- Indikator Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara, ditetapkan selama 5 hari menjadi 3,11 hari atau hanya sebesar 62,20%
- Indikator untuk Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.318.714.000.000,- sedangkan capaian pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.908.466.888.772,- dengan perhitungan nilai pengeluaran wisatawan sama dengan tahun 2021. Sehingga melewati target yang telah ditetapkan yaitu 144,72%
- Dan indikator Nilai PDRB Bidang Pariwisata ditargetkan sebesar 3,15% dan capaian kinerja yaitu 1,49% atau sebesar 47,30% dari target yang ditetapkan.

b) Secara garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Pariwisata yang akan diusulkan sebanyak 5 (Lima) Program dan 16 Kegiatan yang

dijabarkan dalam 49 sub kegiatan yang tersebar pada beberapa lokasi yaitu :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan berupa :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (berlokasi di 11 Kabupaten/Kota)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (berlokasi di Kota Ambon dan Provinsi DKI Jakarta)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (berlokasi di Kota Ambon)

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (berlokasi di Kota Ambon)
 - Fasilitas Kunjungan Tamu (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (11 Kab/Kota dan Luar Provinsi)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pengadaan Mebel (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (berlokasi di Kota Ambon)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)

2). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah)
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (berlokasi di Kab. Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon)

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (berlokasi di Kota Ambon dan Luar Daerah)

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (berlokasi di Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Provinsi DKI Jakarta)
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (berlokasi di 3 DTW, Pantai Hunimua, Gong Perdamaian Dunia dan Pantai Namalatu)

3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (berlokasi di Kab. Kep. Aru, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Tenggara, Provinsi DKI Jakarta)
- Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata (berlokasi di Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon, Provinsi DKI Jakarta)

3). Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di Kota Ambon dan Provinsi DKI Jakarta).
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di 11 Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan)
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di Kota Ambon)
 - Peningkatan Kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Kota Ambon, Provinsi DKI Jakarta)

4). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Penyediaan sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, Provinsi DKI Jakarta)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (berlokasi di Pulau Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya)
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - Pemberian Insentif (berlokasi di Kab. Kep. Aru, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual)
 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual (berlokasi di Kota Ambon,)
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (berlokasi Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi DKI Jakarta).

5). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (berlokasi di Kota Ambon, Provinsi DKI Jakarta)
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (berlokasi di Kab. Seram Bagian Barat, Kota Tual, Provinsi DKI Jakarta)
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan (berlokasi di Kab. Maluku Tengah)
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kab. Maluku Tengah)
 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kab. Maluku Tengah)
- Total kebutuhan dana sebesar Rp. 28.742.377.763 berasal dari Dana Alokasi Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada lampiran 4.

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					PARIWISATA								
3	26	02			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				13,339,828,114				14,006,819,520
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,035,376,253				1,087,145,066
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	750,000,000	APBD		1 Dokumen	787,500,000
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	19,587,024	APBD		1 Dokumen	20,566,375
3	26	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	14,055,120	APBD		1 Dokumen	14,757,876
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 kab/kota	1 Dokumen	251,734,109	APBD		1 Dokumen	264,320,814
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,602,180,000	APBD			7,982,289,000
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata	60 orang/ Bulan	7,500,000,000	APBD		60 orang/ Bulan	7,875,000,000
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	95,280,000	APBD		1 Dokumen	100,044,000
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	3,450,000	APBD		1 Dokumen	3,622,500

3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	3,450,000	APBD		1 Dokumen	3,622,500
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				318,947,500	APBD			334,894,875
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Pariwisata	1 paket	68,947,500	APBD		1 paket	72,394,875
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Pariwisata	10 orang	150,000,000	APBD		10 orang	157,500,000
3	26	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata	120 orang	100,000,000	APBD		120 orang	105,000,000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				768,217,700	APBD			806,628,585
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	5 paket	20,000,000	APBD		5 paket	21,000,000
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pariwisata	4 paket	214,964,000	APBD		4 paket	225,712,200
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Pariwisata	25 paket	30,000,000	APBD		25 paket	31,500,000
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	4 paket	75,000,000	APBD		4 paket	78,750,000
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pariwisata	4 paket	20,801,700	APBD		4 paket	21,841,785
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan kunjungan tamu luar daerah	Dinas Pariwisata	1 laporan	22,452,000	APBD		1 laporan	23,574,600
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	11 kab/kota	4 laporan	385,000,000	APBD		4 laporan	404,250,000
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				868,252,000	APBD			911,664,600
3	26	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 unit	718,252,000	APBD		1 unit	754,164,600

3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 paket	100,000,000	APBD		1 paket	105,000,000
3	26	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Pariwisata	1 unit	50,000,000	APBD		1 unit	52,500,000
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,028,016,661	APBD			2,129,417,494
3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata	1 laporan	2,500,000	APBD		1 laporan	2,625,000
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 laporan	165,000,000	APBD		1 laporan	173,250,000
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 laporan	1,860,516,661	APBD		1 laporan	1,953,542,494
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				718,838,000	APBD			754,779,900
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Pariwisata	1 unit	48,945,000	APBD		1 unit	51,392,250
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Pariwisata	24 unit	364,653,000	APBD		24 unit	382,885,650
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Pariwisata	35 unit	75,000,000	APBD		35 unit	78,750,000
3	26	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Dinas Pariwisata	4 unit	30,240,000	APBD		4 unit	31,752,000
3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas Pariwisata	1 Tahun	200,000,000	APBD		1 Tahun	210,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				6,984,666,000				7,333,899,300
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				6,984,666,000	APBD			7,333,899,300

3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	11 Kabupaten / Kota di Maluku.	1 dokumen	2,084,000,000	APBD		1 dokumen	2,188,200,000
3	26	03	1.01	0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	11 Kabupaten/Kota di Maluku, Daerah Lainnya.	5 laporan	3,959,841,000	APBD		5 laporan	4,157,833,050
3	26	03	1.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	11 Kab/Kota	1 dokumen	60,825,000	APBD		1 dokumen	63,866,250
3	26	03	1.01	0004	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Provinsi Maluku	1 dokumen	880,000,000	APBD		1 dokumen	924,000,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				8,247,690,358	APBD			8,660,074,876
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1,197,690,358	APBD			1,257,574,876
3	26	02	1.01	0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	jumlah lokasi daya tarik unggulan provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	Provinsi Maluku	3 lokasi	1,093,101,758	APBD		3 lokasi	1,147,756,846
3	26	02	1.01	0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata unggulan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	104,588,600	APBD		1 dokumen	109,818,030
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				6,450,000,000	APBD			6,772,500,000

3	26	02	1.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	kab/kota	11 lokasi (kab/Kota)	1,650,000,000	APBD		11 lokasi (kab/Kota)	1,732,500,000
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	kab/kota	5 unit	4,500,000,000	APBD		5 unit	4,725,000,000
3	26	02	1.03	0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	prov Maluku	1 laporan	300,000,000	APBD		1 laporan	315,000,000
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				600,000,000	APBD			630,000,000
3	26	02	1.04	0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Kab /kota	1 laporan	300,000,000	APBD		1 laporan	315,000,000
3	26	02	1.04	0005	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	jumlah unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi	kab/kota	30 unit usaha	300,000,000	APBD		35 unit usaha	315,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3,420,000,000	APBD			3,591,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				3,170,000,000	APBD			3,328,500,000
3	26	05	1.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan kompetensinya	Provinsi Maluku	30 orang	1,800,000,000	APBD		30 orang	1,890,000,000

3	26	05	1.01	0002	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Malra dan Aru	60 orang	250,000,000	APBD		75 orang	262,500,000
3	26	05	1.01	0003	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan	Kab SBB, MBD	110 orang	750,000,000	APBD		115 orang	787,500,000
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kota Tual dan Kab. Malra	60 orang	250,000,000	APBD		60 orang	262,500,000
3	26	05	1.01	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi	Kab Aru, Kab Malra, Kab SBB, dan Kab Malteng	1 dokumen	120,000,000	APBD		1 dokumen	126,000,000
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				250,000,000	APBD			262,500,000
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	KKT	50 orang	250,000,000	APBD		55 orang	262,500,000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				2,850,000,000	APBD			2,992,500,000
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1,950,000,000	APBD			2,047,500,000
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kota Ambon dan Maluku Tengah	3 Laporan	1,400,000,000			3 Laporan	1,470,000,000
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula	Malra, SBT, Bursel, MBD, KKT, Maluku Tengah	5 laporan	550,000,000	APBD		5 laporan	577,500,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				900,000,000	APBD			945,000,000

3	26	04	1.02	0007	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf	11 kab/Kota	1 dokumen	500,000,000	APBD		1 dokumen	525,000,000
3	26	04	1.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Ambon	1 dokumen	300,000,000			1 dokumen	315,000,000
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif	SBT, KKT	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	105,000,000
									34,842,184,472				36,584,293,696

Rancangan Akhir

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					PARIWISATA								
3	26	02			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				13,339,828,114				14,006,819,520
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,035,376,253				1,087,145,066
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	750,000,000	APBD		1 Dokumen	787,500,000
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	19,587,024	APBD		1 Dokumen	20,566,375
3	26	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	14,055,120	APBD		1 Dokumen	14,757,876
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 kab/kota	1 Dokumen	251,734,109	APBD		1 Dokumen	264,320,814
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,602,180,000	APBD			7,982,289,000
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata	60 orang/ Bulan	7,500,000,000	APBD		60 orang/ Bulan	7,875,000,000
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	95,280,000	APBD		1 Dokumen	100,044,000
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	3,450,000	APBD		1 Dokumen	3,622,500

3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	3,450,000	APBD		1 Dokumen	3,622,500
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				318,947,500	APBD			334,894,875
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Pariwisata	1 paket	68,947,500	APBD		1 paket	72,394,875
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Pariwisata	10 orang	150,000,000	APBD		10 orang	157,500,000
3	26	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata	120 orang	100,000,000	APBD		120 orang	105,000,000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				768,217,700	APBD			806,628,585
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	5 paket	20,000,000	APBD		5 paket	21,000,000
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pariwisata	4 paket	214,964,000	APBD		4 paket	225,712,200
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Pariwisata	25 paket	30,000,000	APBD		25 paket	31,500,000
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	4 paket	75,000,000	APBD		4 paket	78,750,000
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pariwisata	4 paket	20,801,700	APBD		4 paket	21,841,785
3	26	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan kunjungan tamu luar daerah	Dinas Pariwisata	1 laporan	22,452,000	APBD		1 laporan	23,574,600
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	11 kab/kota	4 laporan	385,000,000	APBD		4 laporan	404,250,000

3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				868,252,000	APBD			911,664,600
3	26	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendararan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 unit	718,252,000	APBD		1 unit	754,164,600
3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 paket	100,000,000	APBD		1 paket	105,000,000
3	26	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Pariwisata	1 unit	50,000,000	APBD		1 unit	52,500,000
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,028,016,661	APBD			2,129,417,494
3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata	1 laporan	2,500,000	APBD		1 laporan	2,625,000
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 laporan	165,000,000	APBD		1 laporan	173,250,000
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	1 laporan	1,860,516,661	APBD		1 laporan	1,953,542,494
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				718,838,000	APBD			754,779,900
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Pariwisata	1 unit	48,945,000	APBD		1 unit	51,392,250
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Pariwisata	24 unit	364,653,000	APBD		24 unit	382,885,650
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Pariwisata	35 unit	75,000,000	APBD		35 unit	78,750,000
3	26	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Dinas Pariwisata	4 unit	30,240,000	APBD		4 unit	31,752,000

3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas Pariwisata	1 Tahun	200,000,000	APBD		1 Tahun	210,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				6,984,666,000				7,333,899,300
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				6,984,666,000	APBD			7,333,899,300
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	11 Kabupaten / Kota di Maluku.	1 dokumen	2,964,000,000	APBD		1 dokumen	3,112,200,000
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	11 Kab/Kota	1 dokumen	60,825,000	APBD		1 dokumen	63,866,250
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	11 Kabupaten/Kota di Maluku, Daerah Lainnya.	5 laporan	3,959,841,000	APBD		5 laporan	4,157,833,050
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				6,697,690,358	APBD			7,032,574,876
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				4,604,588,600	APBD			4,834,818,030
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi Daya tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya tarik Wisata Provinsi	3 Lokasi	3 Lokasi	4,500,000,000	APBD		orang	4,725,000,000
3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata unggulan Provinsi	Kab/kota	1 dokumen	104,588,600	APBD		1 dokumen	109,818,030
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1,493,101,758	APBD			1,567,756,846

3	26	02	1.03	0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	kab/kota	5 unit	1,093,101,758	APBD		5 unit	1,147,756,846
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah orang pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang dikembangkan	Maluku	orang	300,000,000	APBD		orang	315,000,000
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Maluku	1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	105,000,000
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				600,000,000	APBD			630,000,000
3	26	02	1.04	0012	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Maluku	30 usaha	300,000,000	APBD		30 usaha	315,000,000
3	26	02	1.04	0013	Kesediaan Pelaku Usaha memenuhi standar usaha Pariwisata	jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Maluku	1 laporan	300,000,000	APBD		1 laporan	315,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3,420,000,000	APBD			3,591,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				3,170,000,000	APBD			3,328,500,000
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kota Tual dan Kab. Malra	60 orang	250,000,000	APBD		60 orang	262,500,000
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	jumlah masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Maluku	60 orang	250,000,000	APBD		75 orang	262,500,000
3	26	05	1.01	0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan Bagi Pemerintah Daerah	Jumlah orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Maluku	110 orang	750,000,000	APBD		115 orang	787,500,000

3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	Maluku	30 orang	1,800,000,000	APBD		30 orang	1,890,000,000
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi	Kab Aru, Kab Malra, Kab SBB, dan Kab Malteng	1 dokumen	120,000,000	APBD		1 dokumen	126,000,000
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				250,000,000	APBD			262,500,000
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	KKT	50 orang	250,000,000	APBD		55 orang	262,500,000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				2,850,000,000	APBD			2,992,500,000
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1,950,000,000	APBD			2,047,500,000
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kota Ambon dan Maluku Tengah	3 Laporan	1,400,000,000			3 Laporan	1,470,000,000
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula	Malra, SBT, Bursel,MBD, KKT, Maluku Tengah	5 laporan	550,000,000	APBD		5 laporan	577,500,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				900,000,000	APBD			945,000,000
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif	SBT, KKT	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	105,000,000
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Ambon	1 dokumen	300,000,000			1 dokumen	315,000,000

3	26	04	1.02	0018	Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf	11 kab/Kota	1 dokumen	500,000,000	APBD		1 dokumen	525,000,000
									33,292,184,472				34,956,793,696

BAB V

PENUTUP

Melalui penyusunan renja ini, perlu disampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bagi rencana tindak lanjut, antara lain :

1. Pengusulan dan pengembangan Istana Mini Banda Neira sebagai istana kepresidenan wilayah Indonesia Timur.
2. Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Banda Neira
3. Pembangunan sistem dan moda transportasi (darat, laut, udara) yang terintegrasi dengan destinasi di sekitar seperti Ambon, Tual, Aru, Tanimbar, Wakatobi, Raja Ampat. Turut mendorong kunjungan wisata dari Australia dan Asia Pasifik.
4. Kerjasama dengan influencer, content creator, media massa, perusahaan penerbangan, *travel agent*, BUMN, perbankan, serta pihak luar negeri dalam rangka promosi wisata ke Maluku;
5. Perawatan, pelestarian, dan peningkatan kuantitas dan kualitas daya tarik Wisata.
6. Penyediaan fasilitas pendukung yang representatif, nyaman dan berkelas di setiap spot wisata (bahari, sejarah, agrowisata, maupun minat khusus)
7. Penguatan industri pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif berbasis komoditi lokal dengan dukungan akses modal, sarana dan prasarana produksi, serta pemasaran yang masif baik online maupun offline (digital).
8. Peningkatan SDM, Kelembagaan masyarakat, dan kultur sadar wisata.

Untuk hal-hal tersebut, perlu dukungan antara lain kualitas sumber daya aparatur yang memadai, penganggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi antar pemangku kepentingan yang intens, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Dengan kata lain, rencana kerja Dinas Pariwisata dapat berjalan dengan lancar apabila proses administrasi dan manajemen berjalan secara seimbang dan berkesinambungan.

LAMPIRAN :

1. Evaluasi Renja TW IV Tahun 2022
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
3. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah 2024 dan Prakiran Maju 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku